

Mengukur risiko ekonomi di negara anggota G20

Syurkani Ishak Kasim¹

Pendahuluan

Krisis ekonomi dan keuangan global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan kerugian yang besar bagi banyak negara. Krisis tersebut tidak saja mempengaruhi kondisi perekonomian di negara maju, seperti Amerika Serikat atau negara-negara di kawasan Eropa, namun juga mulai berdampak kepada negara-negara di kawasan lain di dunia, termasuk banyak negara di Asia. Dampak krisis yang paling besar dirasakan adalah meningkatnya jumlah pengangguran di negara-negara maju dan pada saat bersamaan juga negara-negara tersebut mengalami kesulitan fiskal akibat defisit yang tinggi serta minusnya neraca pembayaran.

Lebih jauh, krisis yang sama juga mempengaruhi kondisi bisnis para investor internasional dan memaksa mereka untuk melakukan reformulasi ulang strategi investasi mereka ke depan. Salah satu masalah utama yang dihadapi dalam hal ini yaitu adanya ketidakpastian arah kebijakan pemerintah ke depan, tidak saja kebijakan yang dibuat di negara-negara *emerging* sebagai tempat investasi strategis, namun terutama juga ketidakpastian prioritas kebijakan di bidang ekonomi yang dibuat di negara maju baik di Amerika dan Eropa. Menjadi pertanyaan besar bagi para investor, kebijakan seperti apa yang akan diambil oleh para pemimpin pemerintahan tersebut ke depan, mengingat terbatasnya ruang untuk ekspansi fiskal, sementara pada saat bersamaan dibutuhkan banyak dukungan dalam bentuk stimulus untuk tetap menggerakkan roda perekonomian dan mempertahankan momentum pertumbuhan.

Sementara itu negara-negara di Asia secara umum masih berada dalam posisi yang lebih baik, dimana krisis yang terjadi Eropa belum membawa pengaruh yang signifikan bagi perekonomian di Asia yang sampai memaksa pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan-kebijakannya. Namun demikian, ketidakpastian global telah menyebabkan turunya

¹ Penulis bekerja pada Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Kementerian Keuangan. Penulis dapat dihubungi melalui email: syurkani@fiskal.depkeu.go.id.

pertumbuhan dan produktivitas perekonomian di negara-negara Asia. Indonesia termasuk salah satu negara yang sampai saat ini masih mampu untuk bertahan dengan tetap mempertahankan momentum pertumbuhan ekonominya. Namun apabila kondisi krisis terus berlanjut, maka besar kemungkinan Indonesia dan negara-negara Asia lain akan mengalami gejolak ekonomi yang tinggi yang mengancam prospek pertumbuhan ke depan. Disamping itu, dampak dari krisis global juga dapat merubah strategi dan prioritas kebijakan dalam negeri dalam rangka menyesuaikan dengan lingkungan ekonomi global terkini. Studi ini akan melihat fenomena krisis yang terjadi dan bagaimana risiko ekonomi global mempengaruhi kondisi negara-negara anggota G20, baik secara kelompok maupun secara individual.

Tujuan dari studi ini yaitu mengamati fenomena yang terjadi sejak krisis keuangan tahun 2008 yang melanda banyak negara di dunia, terutama negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang serta negara-negara anggota G20 lain termasuk Indonesia sampai kepada krisis utang pemerintah di kawasan Euro. Hasil studi akan memberikan gambaran analisis empiris singkat mengenai dampak dari krisis tersebut terhadap masa depan perekonomian negara anggota G20 serta risiko-risiko yang terkait atau mempengaruhinya. Studi ini mencoba untuk membandingkan risiko-risiko ekonomi di antara negara-negara anggota G20 serta upaya untuk mitigasi risiko-risiko tersebut.

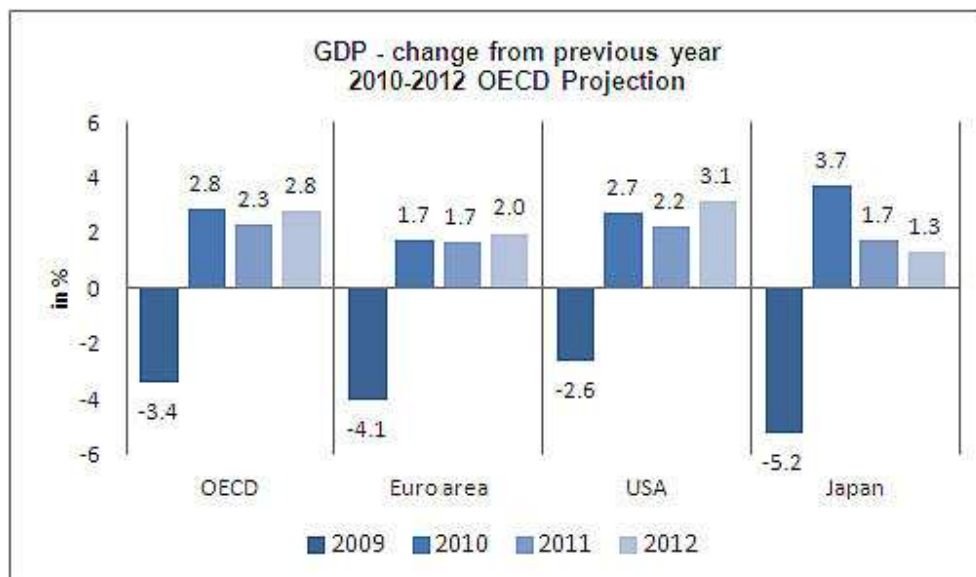
Studi ini akan dibagi ke dalam empat bagian, dimulai dengan latar belakang dan kemudian diikuti oleh tinjauan singkat krisis ekonomi global terakhir. Dalam hal ini akan disoroti perkembangan kondisi perekonomian di sejumlah negara anggota G20 serta beberapa negara terbatas lain dalam rangka melihat bagaimana kebijakan di negara-negara tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal global. Disamping itu, akan dilihat juga bagaimana inisiatif-inisiatif baru di G20 memberikan pengaruh kepada perubahan strategi dan sasaran pertumbuhan ekonomi. Pada bagian ketiga akan dilakukan analisis deskriptif mengenai risiko ekonomi yang mempengaruhi terjadinya instabilitas di perekonomian dunia. Pada bagian terakhir akan disampaikan kesimpulan.

Melihat kembali krisis keuangan global 2008-2009

Krisis keuangan global tahun 2008-2009 dimulai dengan terjadinya kekurangan likuiditas (*liquidity shortfall*) di Amerika Serikat akibat penggelembungan nilai aset (*asset overvaluation*). Hasilnya beberapa lembaga keuangan terkemuka di sana mengalami kesulitan keuangan yang sangat serius yang sebagiannya berakibat kepada kebangkrutan. Tidak lama setelah itu, kondisi ekonomi Eropa mengalami dampak penularan dari krisis di Amerika Serikat, dan akibatnya mengakibatkan perlambatan pertumbuhan, meningkatkan pengangguran dan lebih parah lagi memberikan dampak negatif kepada kelangsungan perdagangan global, termasuk transaksi dari negara berkembang.

Sesuai data proyeksi yang dilakukan oleh OECD terhadap negara-negara anggotanya, negara Euro, Amerika Serikat dan Jepang pada saat itu, di tahun 2009 pertumbuhan ekonomi di negara anggota OECD berada pada angka negatif 3.4%, kemudian kembali positif pada level 2.8% di tahun berikutnya. Namun demikian, tingkat pertumbuhan kembali mengalami kontraksi pada tahun 2011 menjadi 2.3%.

Gambar 1: Proyeksi pertumbuhan 2009-2012 oleh OECD



Sumber: OECD (2010)

Apabila kita melihat lebih spesifik proyeksi pertumbuhan di kawasan Euro, pada saat itu terjadi tren peningkatan pertumbuhan dari angka negatif 4.1% di tahun 2009 menjadi positif 1.7% di tahun 2010 dan juga tahun 2011, dan kemudian meningkat menjadi 2.0% di tahun 2012. Kondisi Amerika Serikat juga mengalami hal yang sama dengan pertumbuhan negatif pada tahun kedua terjadinya krisis, lalu naik ke angka positif pada tahun-tahun berikutnya. Setelah krisis global tersebut, hanya Jepang yang oleh OECD saat itu diproyeksikan mengalami pertumbuhan positif namun dengan tren yang menurun. Apa yang dapat kita lihat dari gambaran tersebut yaitu bahwa pada masa krisis keuangan global tahun 2008, banyak tantangan yang dihadapi oleh negara-negara maju termasuk dalam hal turunnya prospek pertumbuhan ekonomi ke depan. Lebih jauh, kita juga dapat melihat bahwa terlepas dari upaya mitigasi krisis yang cukup sukses, ditandai dengan kembalinya tren pertumbuhan ekonomi ke angka positif, namun beberapa risiko ekonomi muncul dan harus mendapatkan perhatian serius dari para pembuat kebijakan di negara tersebut. Kita akan membahas masalah risiko ini pada bagian studi selanjutnya.

Tabel 1: Proyeksi pertumbuhan negara-negara di Asia

Subregion/Economy	Table 1 Growth rate of GDP (% per year)					Table 2 Inflation (% per year)				
	2009	2010		2011		2009	2010		2011	
		ADO 2010	Update	ADO 2010	Update		ADO 2010	Update	ADO 2010	Update
Central Asia	2.7	4.7	5.1	5.9	5.7	6.1	6.7	6.6	6.6	6.4
Azerbaijan	9.3	9.5	3.8	9.7	3.5	1.5	5.8	5.0	6.0	4.0
Kazakhstan	1.2	2.5	4.8	3.5	5.2	7.3	6.8	6.8	6.5	6.5
East Asia	6.1	8.3	8.6	7.7	7.7	0.0	3.3	3.0	3.0	3.0
China, People's Rep. of	9.1	9.6	9.6	9.1	9.1	-0.7	3.6	3.2	3.2	3.2
Hong Kong, China	-2.8	5.2	5.8	4.3	4.3	0.5	2.2	2.6	2.8	2.8
Korea, Rep. of	0.2	5.2	6.0	4.6	4.6	2.8	3.0	3.0	3.0	3.0
Taipei, China	-1.9	4.9	7.7	4.0	4.0	-0.9	1.5	1.5	1.6	1.6
South Asia	6.7	7.4	7.8	8.0	7.8	5.6	6.0	7.9	6.0	6.5
Bangladesh	5.7	5.5	6.0	6.3	6.3	6.7	7.5	7.3	7.8	7.5
India	7.4	8.2	8.5	8.7	8.7	3.6	5.0	7.5	5.5	5.5
Pakistan ²	1.2	-	4.1	-	2.5	20.8	12.0	11.7	8.0	13.0
Sri Lanka	3.5	6.0	6.5	7.0	7.0	3.5	6.5	6.5	8.0	8.0
Southeast Asia	1.3	5.1	7.4	5.3	5.4	2.6	4.5	4.2	4.5	4.2
Indonesia	4.5	5.5	6.1	6.0	6.3	4.8	5.6	5.2	6.2	5.7
Malaysia	-1.7	5.3	6.8	5.0	5.0	0.6	2.4	1.8	3.0	2.4
Philippines	1.1	3.8	6.2	4.6	4.6	3.2	4.7	4.5	4.5	4.4
Singapore	-1.3	6.3	14.0	5.0	5.0	0.6	2.3	3.0	2.0	2.0
Thailand	-2.2	4.0	7.0	4.5	4.5	-0.9	3.5	3.2	3.0	3.0
Viet Nam	5.3	6.5	6.7	6.8	7.0	6.9	10.0	8.5	8.0	7.5
The Pacific	3.7	3.7	4.3	5.0	5.1	5.4	5.1	5.9	5.4	5.4
Fiji Islands	-2.5	-0.5	-0.5	0.5	0.5	3.7	3.4	6.0	3.1	3.5
Papua New Guinea	4.5	5.5	5.5	7.7	7.7	7.6	7.1	7.1	7.7	7.7
Developing Asia	5.4	7.5	8.2	7.3	7.3	1.5	4.0	4.1	3.9	3.9

Source: ADB (2010)

Sementara itu apabila kita memalingkan muka ke kondisi di negara-negara Asia, Tabel 1 memperlihatkan kinerja ekonomi negara Asia selama krisis 2008 yang berada dalam koridor pertumbuhan yang positif. Terlepas negara-negara ini juga merasakan dampak dari krisis keuangan global saat itu, namun sebagian besar negara di Asia berhasil menangani dampak krisis tersebut. Hal ini terlihat dari proyeksi ADB terhadap pertumbuhan ekonomi negara berkembang di Asia secara keseluruhan yang masih berada pada angka relatif tinggi 8.2% pada tahun 2010 walaupun kemudian turun menjadi 7.3% pada tahun berikutnya. Ini artinya sebagian besar negara di Asia mampu melakukan mitigasi krisis agar tidak berdampak terlalu parah kepada ekonomi mereka.

Apabila kita melihat kepada negara-negara Asia secara individual, maka sesuai tabel di atas, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan India tetap menjadi negara dengan kinerja yang tinggi selama krisis (2009), yang tumbuh masing-masing 9.1% dan 7.4%. Pertumbuhan ekonomi RRT diproyeksikan naik menjadi 9,6% di tahun 2010 dan turun sedikit menjadi 9.1% pada tahun 2011. Sementara itu, India tumbuhan sebesar masing-masing 8.5% dan 8,7% pada tahun 2010 dan 2011. Ini artinya bagi kedua negara tersebut, dampak krisis keuangan global tidak terlalu memberikan pengaruh yang besar ke perekonomian domestik. Proyeksi ini untuk kedua negara tersebut bahkan didukung oleh angka inflasi yang relatif terkontrol selama periode tersebut.

Krisis kawasan Euro (*Eurozone sovereign debt crisis*) 2011-2012

Menurut Angel Gurría, Sekretaris Jenderal OECD, asal muasal terjadinya krisis di kawasan Euro yaitu akibat akumulasi dari ketidakseimbangan fiskal, ekonomi, perbankan dan pasar keuangan secara keseluruhan terutama di saat-saat siklus kredit berada pada titik balik (OECD, 2012). Peningkatan kemampuan ekonomi di beberapa negara anggota Euro yang disertai dengan lemahnya pengawasan di sektor keuangan dan tingkat suku bunga yang rendah memicu kenaikan kredit konsumsi untuk pembelian properti (*housing mortgages*) tanpa persyaratan yang ketat. Keadaan ini juga didukung oleh ekspansi bisnis bank-bank besar dari negara Euro yang lebih maju seperti Jerman, Perancis dan Itali ke negara kawasan Euro lain seperti Yunani, Irlandia, Spanyol dan Portugal.

Krisis utang pemerintah Euro adalah sebuah krisis keuangan yang terus berlanjut yang membuat sulit posisi pemerintah dan bahkan hampir tidak mungkin bagi negara-negara yang terkena krisis untuk mampu menyelesaikan permasalahan fiskal dalam negerinya sendiri tanpa bantuan dari pihak luar (Haidar, 2012). Dari akhir tahun 2009, kekhawatiran akan terjadinya krisis utang pemerintah ini telah dirasakan baik di antara investor dalam negeri, investor internasional, organisasi internasional serta lembaga rating. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya tingkat utang secara total dunia (*world total debts*) baik yang dimiliki oleh masyarakat maupun utang pemerintah.

Kondisi ini terlihat di beberapa negara anggota Euro, dimana penumpukan utang sektor swasta yang dipicu oleh penggelembungan nilai properti (*property bubble*) yang pada saat bermasalah diambil alih dan dikonversikan sebagai utang pemerintah (dalam bentuk *bail-out* sektor perbankan). Dalam kasus Yunani misalnya, ketidakmampuan pemerintahnya untuk melanjutkan pembayaran gaji dan upah pekerja sektor publik akhirnya berdampak kepada peningkatan utang pemerintah dalam waktu yang relatif singkat.

Sementara itu krisis utang pemerintah juga dipicu oleh struktur Euro sendiri sebagai satu kesatuan moneter (satu mata uang Euro). Terdapat ketimpangan pembagian kekuasaan antara otoritas moneter dengan otoritas fiskal. Otoritas moneter di negara anggota Euro menyerahkan sebagian besar kekuasaannya kepada *European Central Bank* (selaku satu-satunya lembaga yang menerbitkan mata uang Euro dan pengendalian sistem moneter), sementara kekuasaan fiskal masih berada sepenuhnya di tangan masing-masing negara anggota. Akibatnya, pengaturan kebijakan moneter menjadi tidak efektif karena kurangnya dukungan dari masing-masing negara anggota Euro sendiri. Hal ini akibat kebijakan untuk menetapkan kebijakan bidang perpajakan dan aturan-aturan lain di area fiskal termasuk struktur sistem jaminan sosial dan pensiun masih dilakukan secara sendiri-sendiri. Kondisi ini terbukti mempersulit koordinasi dalam bidang moneter saat penanganan krisis.

Lebih jauh, salah satu contoh kebijakan fiskal yang tidak terkoordinasi yaitu dalam penentuan besarnya rasio utang terhadap PDB yang bervariasi, dimana negara-negara yang membutuhkan pendanaan lebih besar, terutama yang bersumber dari penerbitan obligasi pemerintah cenderung menetapkan tingkat pajak pendapatan dari keuntungan obligasi yang lebih rendah. Padahal menurut Romer (2012) memiliki ruang fiskal yang besar menjadi sangat bernilai

dalam rangka mencapai situasi fiskal yang sehat dan mampu menjawab kemungkinan menurunnya sisi permintaan. Disamping itu, kebijakan fiskal yang tidak ketat juga membawa kekhawatiran kepada solvabilitas sistem perbankan akibat dari daya tarik ekspansi untuk masuk ke pasar domestik di negara tersebut.

Apabila melihat dampak paling cepat yang menimpa kawasan Euro yaitu volume utang pemerintah di beberapa negara Euro meningkat drastis dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini memberikan kekhawatiran bagi para investor dan bahkan negara-negara di luar Euro mengenai kemungkinan Euro akan pecah. Yunani, Irlandia, dan Portugis merupakan tiga negara yang paling parah mengalami krisis utang pemerintah tersebut. Sementara itu, Spanyol ikut menyusul dengan kenaikan suku bunga yang tinggi yang berdampak kepada kesulitan untuk mendapatkan akses ke pasar modal atau kredit perbankan.

Untuk mengembalikan tingkat kepercayaan publik, baik domestik Euro maupun publik internasional, para pemimpin Euro menyepakati apa yang disebut sebagai *European Fiscal Compact* yang berisikan komitmen dari negara-negara anggota yang berpartisipasi untuk melakukan kebijakan anggaran berimbang (*balanced budget*). Lebih jauh para pembuat kebijakan di Euro juga mengusulkan diberlakukannya integrasi yang lebih jauh di bidang pengelolaan perbankan di seluruh kawasan Euro, termasuk memperkenalkan sistem penjaminan deposito yang berlaku untuk seluruh perbankan di kawasan Euro. Dengan begitu maka akan dapat disepakati pengawasan tunggal perbankan termasuk dalam penetapan kebijakan rekapitalisasi atau resolusi untuk bank yang bermasalah atau ditutup. Sementara pada saat bersamaan *European Central Bank* melakukan sejumlah kebijakan untuk menjaga agar aliran uang antar bank di Eropa dapat berjalan lancar dengan menurunkan tingkat suku bunga pinjaman dan juga memberikan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah kepada bank-bank kecil.

Pada saat bersamaan G20 secara kelompok juga mendesak negara-negara anggota Euro untuk mempertegas komitmen mereka dalam melaksanakan konsolidasi fiskal melalui implementasi *austerity measures*². Negara-negara G20 di luar kawasan Euro menginginkan agar krisis utang pemerintah yang terjadi di Euro tidak memberikan efek penularan yang signifikan

² *Austerity measures* dimaksudkan sebagai kebijakan untuk menurunkan defisit melalui penurunan pengeluaran pemerintah terutama untuk program jaminan sosial dan belanja pegawai. Penurunan pengeluaran ini sering dilakukan bersamaan dengan kenaikan pajak. Kebijakan *austerity* ini dilakukan oleh pemerintah akibat kesulitan dalam menjaga ketersinambungan fiskalnya.

kepada perekonomian global, mengingat konsekuensi yang akan ditimbulkan dari kemungkinan resesi dunia akan sangat besar dan berdampak negatif dalam jangka cukup panjang. Salah satu tekanan kongkrit yang diberikan oleh G20 kepada negara anggota Euro yaitu penerapan *accountability assessment* dalam *mutual assessment process* (MAP) di *Framework* G20. Melalui *accountability assessment* ini, seluruh negara anggota akan dinilai secara spesifik dan dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Dana Moneter Internasional (IMF), maka direkomendasikan sejumlah kebijakan jangka pendek dan kebijakan jangka panjang yang harus diambil.

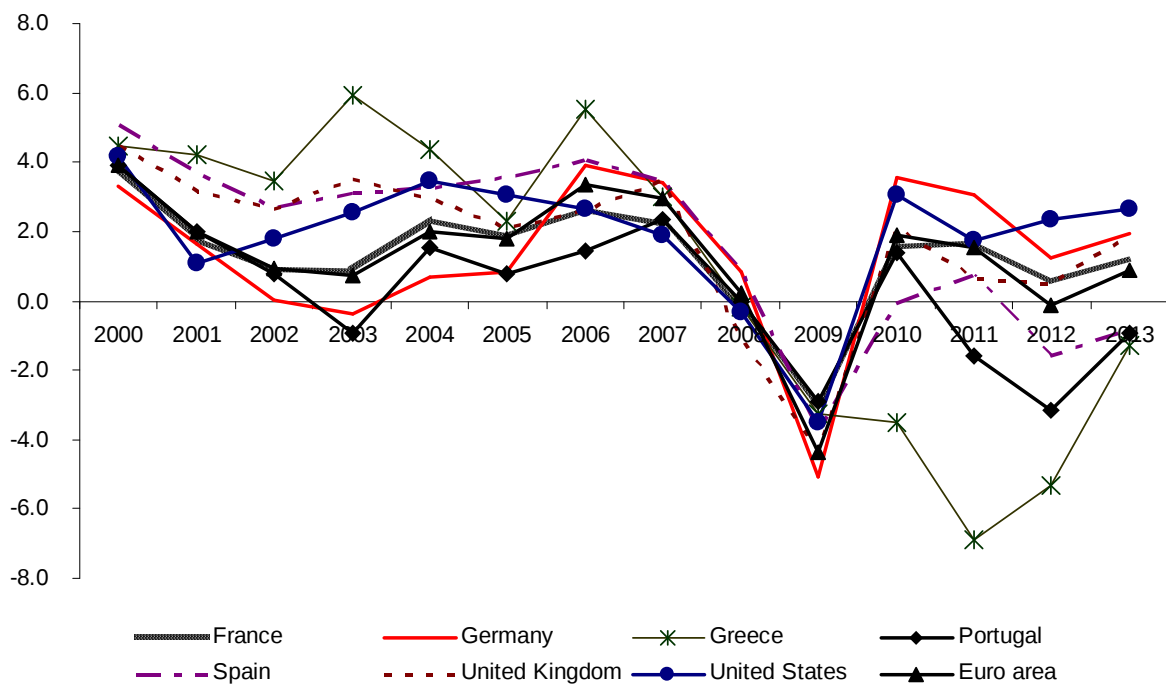
Sejauh ini G20 telah berhasil menyepakati dua rencana aksi di tingkat pemimpin pemerintahan G20 yang secara langsung menyentuh masalah krisis dan alternatif pemulihannya, yaitu *Cannes Action Plan* dan *Los Cabos Growth and Job Creation Action Plan*. Dalam kedua rencana aksi tersebut, negara-negara anggota Euro didesak terutama untuk mempercepat implementasi *austerity measures*, dalam bentuk peninjauan kembali seluruh kebijakan pengeluaran anggaran (*budget spending*), khususnya di sektor-sektor yang sifatnya konsumtif seperti sistim jaminan sosial (*social welfare system*), sistim penggajian pegawai pemerintah, bahkan kepada peninjauan kembali pengeluaran pemerintah untuk sektor-sektor yang tidak mendukung pemulihan krisis ekonomi.

Walaupun negara-negara Euro sepakat bahwa krisis utang pemerintah di kawasan Euro telah menimbulkan kekhawatiran terjadinya resesi ekonomi global yang lebih parah, namun mereka menolak untuk sepenuhnya menerapkan rekomendasi dari G20, terutama yang terkait dengan pelaksanaan *austerity measures*. Dalam pandangan sebagian negara Euro, pemulihan krisis harus juga mempertimbangkan ruang bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Apabila *austerity measures* dilaksanakan secara total, dikhawatirkan akan sangat menyulitkan negara-negara tersebut untuk mendorong peningkatan aktivitas ekonomi termasuk menumbuhkan kembali iklim investasi. Oleh karena itu, negara-negara Euro mengharapkan agar mereka juga diberi kesempatan untuk melaksanakan program konsolidasi fiskalnya dan pada saat bersamaan juga melaksanakan program stimulus ekonomi untuk mengembalikan aktivitas usaha.

Namun demikian, sebagian negara anggota G20 yang lain tetap berada pada keyakinan bahwa yang dibutuhkan oleh negara anggota Euro dalam jangka pendek yaitu pelaksanaan sepenuhnya semua komitmen terkait program konsolidasi fiskal dalam rangka meningkatkan disiplin anggaran. Ini artinya implementasi *austerity measures* harus dilakukan secara total. Praktek yang selama ini umum dilakukan di negara-negara maju terutama saat akan menghadapi

pemilihan umum adalah mengedepankan program-program jaminan sosial, ketenagakerjaan, dan isu pensiun untuk mendapatkan lebih banyak suara yang dibutuhkan untuk memenangkan pemilihan. Melalui penerapan *austerity measures*, maka janji-janji politik tersebut terpaksa dikurangi yang membawa risiko kejatuhan pemerintahan yang berkuasa³. Namun dengan kondisi buruk yang terjadi saat ini di Eropa, maka G20 dihadapkan pada pilihan apakah akan membiarkan sebagian negara anggotanya terkena dampak krisis yang terus menerus yang setiap saat dapat mengancam perekonomian negara-negara lain di luar Euro, ataukah akan dicari alternatif solusi untuk mendukung pemulihan dari krisis.

Gambar 2: Tren pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara dan kawasan Euro



Sumber: OECD (2012)

Melihat gambar 2 diatas, beberapa negara di kawasan Euro yang mengalami krisis terparah seperti Yunani, Portugis, dan Spanyol sebenarnya masih memiliki prospek pertumbuhan yang cenderung positif ke depan. Yunani mengalami dampak paling parah dari krisis dan mengalami pertumbuhan negatif sejak terjadinya krisis keuangan global tahun 2008-2009.

³ Risiko ini sudah terjadi di negara-negara seperti Yunani, Perancis dan Italia, dimana pemerintah yang berkuasa kalah dalam pemilihan umum digantikan oleh pemenang pemilu yang menjanjikan program jaminan sosial.

Sementara beberapa negara lain yang saat ini mengalami krisis seperti Portugis dan Spanyol diproyeksikan akan tetap mengalami pertumbuhan positif sampai dua tahun ke depan. Data ini menunjukkan bahwa persoalan krisis di kawasan Euro tidak lah semata karena isu pertumbuhan ekonomi yang terlihat dari kemampuan sebagian besar negara yang terkena krisis tahun 2008/2009 melakukan upaya pemulihan dan bahkan mampu mencapai angka pertumbuhan yang positif di tahun berikutnya, kecuali Yunani. Oleh karenanya dorongan yang diberikan oleh G20 kepada negara Euro untuk konsisten melaksanakan konsolidasi fiskal secara total merupakan pilihan yang paling sesuai saat ini.

Disamping itu, G20 sebenarnya memiliki tujuan jangka lebih panjang yang disepakati sebagai sebuah kerangka pertumbuhan yang kuat, berkesinambungan dan berimbang.⁴ Oleh karena itu, sangat penting bagi G20 untuk menjaga momentum memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ini, tidak saja sebagai dasar untuk menciptakan lingkungan ekonomi global yang lebih baik, namun lebih penting lagi untuk menunjukkan kepada seluruh negara di dunia bahwa G20 adalah forum utama ekonomi dunia yang memiliki kontribusi positif bagi peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi global di masa mendatang.

Analisis risiko global

Pada bagian ini akan digambarkan beberapa risiko ekonomi pada tingkat global sebagai dampak dari krisis yang terjadi baik di tahun 2008/2009 maupun krisis terakhir utang pemerintah di kawasan Euro. Akan dilihat juga secara singkat pengaruhnya terhadap perekonomian di Asia yang merupakan wilayah dengan kondisi ekonomi yang sangat dinamis. Analisis ini akan menekankan pada proses evaluasi dari komitmen negara-negara anggota G20 yang dilaksanakan selama ini dalam bentuk *mutual assessment process*.

Terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh negara-negara Euro untuk menemukan solusi bagi pemulihan krisis utang pemerintah, peningkatan kondisi keuangan masih berada dalam posisi yang sangat rentan dan akan mudah mengalami kontraksi kembali (IMF, 2012). Oleh karenanya menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana risiko-risiko ini dapat membawa dampak kepada kemungkinan memburuknya situasi perekonomian global, terutama di negara-negara anggota Euro dan juga negara lain khususnya di Asia termasuk Indonesia.

⁴ lihat artikel terkait oleh Syurkani Ishak Kasim dan Regina Patricia Mboeik dalam buku ini.

Menurut IMF (2012), prospek pertumbuhan ke depan masih mungkin melemah dan ekonomi global masih sangat rentan terhadap risiko-risiko yang tidak terduga. Risiko yang paling mudah untuk terjadi saat ini yaitu di sektor keuangan dan pasar modal di kawasan Euro. Ini sangat terkait dengan tingkat kepercayaan dari para investor internasional dan pelaku pasar di Eropa sendiri. Dengan dilakukannya penurunan rating secara signifikan oleh lembaga rating internasional, maka biaya investasi di kawasan Euro menjadi lebih tinggi dan mempengaruhi kemampuan pinjam oleh kalangan usaha untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di sana.

Risiko ini juga dikaitkan dengan kemampuan pemerintah di negara-negara Euro untuk mengimplementasikan sejumlah kebijakan dan komitmen yang telah disepakati baik oleh para pemimpin Euro sendiri maupun komitmen yang dicapai dalam kesepakatan-kesepakatan internasional seperti G20. Dalam hal ini, lemahnya sektor pemerintah, perbankan yang disertai oleh menurunnya prospek pertumbuhan ekonomi akan mengganggu proses pengembalian tingkat kepercayaan konsumen. IMF menyatakan bahwa sangat penting bagi wilayah Euro saat ini untuk secepatnya melakukan implementasi lima strategi penanganan krisis di kawasan Euro yang telah disepakati bersama sebagai salah satu bentuk mitigasi krisis (IMF, 2012).⁵

Dalam analisis *European Central Bank* (ECB), risiko makroekonomi masih terus membayangi program stabilisasi yang dilaksanakan saat ini, baik di kawasan Euro sendiri maupun dalam skala global (ECB, 2012). Terlepas dari mulai terlihatnya ekspansi perekonomian yang menguat, prospek makroekonomi masih dibayangi oleh ketidakpastian, terutama akibat masih rentannya kondisi di negara maju yang disertai dengan masih relatif tingginya harga-harga komoditas, khususnya minyak serta belum selesainya permasalahan ketidakseimbangan global.

Apabila dilihat dari risiko utama yang cukup signifikan mempengaruhi negara anggota G20, *World Economic Forum* dalam laporan risiko global terakhir menempatkan risiko ekonomi dan risiko geopolitik dalam urutan teratas risiko global (WEF, 2012). Dalam hal risiko geopolitik sebenarnya sudah terjadi dengan naiknya berbagai harga komoditas beberapa waktu yang lalu, khususnya komoditas energi. Risiko harga komoditas ini ditengarai akibat ketidakpastian informasi pasar, dimana proses permintaan dan penawaran tidak terlalu transparan tergambar dalam kegiatan di pasar komoditas global.

⁵ Elemen utama dari strategi tersebut mencakup penguatan financial firewalls, pembiayaan dan rekapitalisasi perbankan, penguatan tata kelola pemerintah di kawasan Euro, dukungan peningkatan pertumbuhan melalui reformasi struktural, dan pelaksanaan konsolidasi fiskal.

G20 sendiri dalam keketuaan Meksiko tahun 2012 membentuk kelompok kerja energi dan pasar komoditas (*energy and commodity market working group*) yang diketuai oleh Indonesia dan Inggris, dimana salah satu mandat bagi kelompok kerja tersebut yaitu mengkaji pengaruh dari kebijakan ekonomi di masing-masing negara anggota terhadap volatilitas harga komoditas baik di tingkat domestik maupun di pasar global.⁶

Disamping itu, risiko geopolitik lain yang cukup signifikan yaitu terjadinya pergantian pemerintahan di beberapa negara anggota Euro sebagai akibat dari kebijakan pemulihan krisis utang pemerintah di Euro. Dalam banyak kasus di masa lalu, regim yang memerintah pada saat terjadi krisis akan selalu harus mengorbankan kekuasaan politiknya pada saat pemilihan umum berikutnya, karena ketidakmampuan untuk menghilangkan persepsi masyarakat bahwa mereka adalah bagian dari krisis itu sendiri, oleh karenanya tidak dapat diandalkan untuk usaha-usaha pemulihan ekonomi ke depan. Hal ini akan terjadi terlepas dari kapasitas individu yang bersangkutan menerapkan berbagai rencana pemulihan krisis.⁷

Gambar 3: Deviasi neraca pembayaran negara anggota G20



Sumber: European Central Bank (2012)

⁶ Untuk analisis lebih lanjut terkait pembahasan isu energi dan komoditas di G20, lihat tulisan Regina Patricia Mboeik dan Rakhmidyanto mengenai “pengaruh kebijakan makroekonomi terhadap volatilitas harga komoditas dalam perspektif G20” yang termuat dalam buku ini.

⁷ Lihat kasus-kasus pergantian pemerintahan di Inggris, Perancis, Italia, Yunani, dan Indonesia sendiri.

Sementara itu, risiko ekonomi yang menjadi perhatian terletak pada masih tingginya masalah ketidakseimbangan global sebagai fokus pembahasan dalam setiap pertemuan di G20. Apabila merujuk kepada gambar 3 diatas, maka dapat dilihat di antara negara anggota G20, sebagian besar mengalami permasalahan dengan neraca pembayaran. Dalam hal ini terjadi ketidakseimbangan keuangan yang secara global masih berkisar pada angka 2% sampai tahun 2015 dengan Amerika Serikat dan RRT akan tetap menjadi penentu pengurangan ketidakseimbangan global ini (ECB, 2012). Negara-negara seperti Rusia, Saudi Arabia dan Indonesia yang termasuk sebagai produser sumber daya alam terbesar di dunia akan menyandang status sebagai negara surplus, sementara negara-negara G20 yang relatif perekonomiannya setara dengan Indonesia (Australia, Canada, dan Turki) akan mengalami kondisi defisit.

Dalam membicarakan proses pengurangan ketidakseimbangan global, maka penting agar kebijakan peningkatan permintaan domestik menjadi pertimbangan. Namun kebijakan ini harus dilaksanakan secara bersamaan dengan upaya untuk mengurangi proteksionisme. Dalam hal ini apabila negara surplus dapat mengurangi surplusnya dengan tetap berpegang pada komitmen untuk pertumbuhan ekonomi, maka permasalahan rendahnya permintaan domestik dapat diselesaikan seiring berjalannya waktu (Spence, 2012). Namun untuk melaksanakan ini maka diperlukan komitmen untuk melaksanakan reformasi struktural secara total, termasuk dalam hal ini Amerika Serikat sendiri sebagai negara defisit, dan RRT sebagai negara surplus.

Terlepas dari kondisi perekonomian di negara *emerging* yang masih relatif baik, dampak dari gejolak perekonomian global secara terus menerus akan mempengaruhi negara emerging dalam jangka panjang termasuk dalam hal kemungkinan terjadinya ketidakpastian dalam penilaian harga aset (*asset price bubbles*), fluktuasi suku bunga domestik terutama obligasi negara dan lebih penting lagi kepada ketidakstabilan aliran modal.

Sementara itu di Asia sendiri, akibat dari dampak krisis terakhir telah memaksa negara-negara di Asia, khususnya di Asia Timur untuk melakukan perubahan strategi pertumbuhan ekonominya secara signifikan dari yang berorientasi kepada ekspor dan meningkatkan ketergantungan dari konsumsi domestik. Hal ini bertujuan untuk menciptakan tren pertumbuhan ekonomi yang lebih berkesinambungan (*sustainable growth*). Lebih jauh, pengeluaran anggaran dalam bentuk stimulus ekonomi guna mendorong pasar untuk maju sudah tidak lagi dipandang sebagai sebuah strategi yang baik untuk jangka panjang. Dalam hal ini ketersinambungan fiskal

dengan menjaga defisit anggaran pada batas terkendali menjadi sebuah konsep mutlak yang dianut di banyak negara di Asia saat ini.

Menurut Bank Pembangunan Asia, bagi negara-negara di Asia pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan jangka panjang menjadi target utama, oleh karenanya strategi pertumbuhan diarahkan untuk menciptakan sumber-sumber pertumbuhan baru yang lebih kuat, berkesinambungan, inklusif dan aman (ADB, 2010). Oleh karenanya inisiatif-inisiatif baru di perkenalkan pada level regional dalam rangka mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi tersebut, termasuk dalam meningkatkan aspek pembiayaan infrastruktur, memperkuat sektor riil dan meningkatkan kapasitas dalam penguasaan teknologi informasi (*knowledge economy*).

Untuk menjawab tantangan risiko perekonomian global saat ini, G20 merumuskan langkah-langkah dan komitmen melalui *mutual assessment process* (MAP), dimana bagi negara maju disarankan untuk lebih disiplin dalam menjaga tahap-tahap konsolidasi fiskal yang dilaksanakan saat ini. Secara spesifik, negara maju diminta untuk menurunkan tingkat suku bunga dan memperkuat tata kelola pemerintahan dan institusi fiskal termasuk dalam hal melaksanakan disiplin fiskal (*sound fiscal discipline*). Lebih jauh, disisi keuangan, negara maju diminta untuk terus melakukan restrukturisasi sektor perbankan, termasuk dalam hal konsolidasi dan resolusi krisis perbankan yang terjadi saat ini. Khusus untuk kawasan Euro diharapkan adanya implementasi nyata terkait penyatuan pengawasan sektor keuangan dalam rangka meminimalkan distorsi dan ketimpangan antar negara anggota Euro sendiri.

Kebijakan dalam memitigasi krisis ke depan di negara emerging diharapkan lebih kepada penguatan permintaan domestik termasuk mengawasi secara ketat tren pertumbuhan kredit yang cukup tinggi. Secara spesifik, rekomendasi G20 kepada negara emerging yaitu memperkuat fondasi fiskal mereka, walaupun dalam jangka pendek menunjukkan kondisi sehat, namun dalam jangka panjang masih harus diperhatikan. Dalam hal ini masalah angka inflasi dan pengeluaran pemerintah terkait subsidi masih menjadi pertimbangan dan rekomendasi G20. Satu isu penting yang selalu menjadi kekhawatiran adalah terkait volatilitas nilai tukar yang mempengaruhi aliran modal ke negara-negara emerging. Dalam hal ini penguatan institusional keuangan dan reformasi regulasi keuangan diharapkan akan terus dilaksanakan.

Penutup

Perekonomian global telah mengalami krisis keuangan berkali-kali sejak perang dunia kedua, dan dari seluruh krisis tersebut, proses pemulihannya berjalan lebih lambat dari yang diperkirakan. Hal ini disebabkan oleh permasalahan komitmen baik dari negara secara individual maupun kelompok negara dalam melaksanakan kesepakatan-kesepakatan ataupun program yang telah ditetapkan. Pada saat bersamaan, kebutuhan untuk terus menjaga kestabilan makroekonomi global adalah kondisi nyata yang harus dipertimbangkan oleh setiap negara.

Negara anggota G20 secara bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri telah melakukan upaya-upaya untuk memitigasi krisis-krisis yang terjadi, baik krisis keuangan global tahun 2008/2009 maupun krisis utang pemerintah di kawasan Euro. Namun, dinamika pembahasan di dalam pertemuan-pertemuan G20 terkait pemenuhan komitmen atas kesepakatan yang selalu menjadi faktor yang sangat sulit dicapai sesuai waktu yang ditetapkan. Hal ini disebabkan saling tarik kepentingan antar negara anggota, dalam hal contoh krisis Euro, maka terjadi perbedaan pandangan antara negara anggota G20 yang juga anggota Euro dengan negara anggota G20 di luar Euro.

Sementara itu, beberapa risiko global yang diidentifikasi sebelumnya merupakan tantangan nyata bagi negara anggota G20 maupun seluruh negara di dunia untuk menemukan solusi mitigasi tanpa terlalu mengorbankan perekonomian negara dalam jangka pendek. Namun melihat besarnya dampak yang akan ditimbulkan dari risiko tersebut, maka menjadi sangat penting bagi negara yang terkena krisis untuk disiplin dalam pelaksanaan komitmen konsolidasi fiskalnya maupun penguatan kebijakan makroekonominya, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

Daftar Pusaka

- ADB. (2010). *Asian development outlook 2010 update: The future growth in Asia*. Manila, Philippines: Asian Development Bank.
- ECB. (2012). *Financial stability review: June 2012*. Frankfurt, Germany: European Central Bank.
- Haidar, J. I. (2012). Sovereign Credit Risk in the Eurozone. *World Economics*, 13(1), 123-136.
- IMF. (2012). *Toward lasting stability and growth: Umbrella report for G-20 mutual assessment process*. Washington, D.C.: International Monetary Fund.
- OECD. (2010). *Economic outlook*. Paris, France: Organization for Economic Cooperation and Development.
- OECD. (2012). *OECD Economic Surveys: Euro Area 2012* (Vol. 2012): OECD Publishing.
- Romer, D. (2012). What have we learned about fiscal policy from the crisis? In O. Blanchard, D. Romer, M. Spence & J. E. Stiglitz (Eds.), *In the wake of the crisis: Leading economists reassess economic policy* (pp. 57-66). Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
- Spence, M. (2009). Investment strategy after the crisis. *Project Syndicate*. Retrieved from [Http://www.project-syndicate.org/](http://www.project-syndicate.org/)
- Spence, M. (2011). *The next convergence: The future of economic growth in a multispeed world*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- WEF. (2010). *Global risks 2010: A global risk network report*. Geneva, Switzerland: World Economic Forum.
- WEF. (2012). *Global risks 2012: Insight report*. Geneva, Switzerland: World Economic Forum.